



2024



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN



Alamat

Jl. A. Yani Km.2,5 Paringin Selatan

Kabupaten Balangan

71618

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini dapat dijadikan pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 dan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan dengan peningkatan kualitas SDM Aparat serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga kegiatan yang berbasis kinerja dapat dicapai secara optimal guna terwujudnya Balangan yang lebih Maju dan Sejahtera.

Paringin, Juli 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Balangan



H. SYAIFUDDIN TAILAH, S.Pd., MM
PEMBINA (IV/C)
NIP. 19670403 199403 1 015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 2

BAB I PENDAHULUAN 3

 A. Latar Belakang 3

 B. Landasan Hukum 4

 C. Maksud dan Tujuan 5

 D. Sistematika Penulisan 6

**BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI TRIWULAN II
TAHUN 2024 7**

 A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan.....
 Triwulan II 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD26

 A. Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD.....26

BAB IV PENUTUP.....42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD perubahan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, Sub Kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan merupakan Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah menjadi mutlak, yaitu menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Selanjutnya, dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Balangan yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2023

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2023 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan Kabupaten Balangan 2023.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 -2026
 17. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
 18. Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

c. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai media evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, sebagai acuan pelaksanaan

program/kegiatan tahun 2024 serta sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan tahun 2024.

Hal yang menjadi salah satu dasar disusunnya Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 adalah adanya melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2020.

2) Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2024 ini adalah

- 1) penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan
- 2) sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
- 3) menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2024 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN,

berisi tentang : Latar Belakang, Menggambarkan data-data kinerja sampai triwulan II tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024,

berisi tentang : Gambaran umum dari hasil analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD,

berisi tentang : Tujuan Sasaran, Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 matrik rumusan program dan kegiatan perubahan

BAB IV PENUTUP

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TRIWULAN II
TAHUN 2024**

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan target indikator kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan melaksanakan 6 Program dengan 12 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka terealisasinya sasaran strategik.

Berdasarkan hasil evaluasi renja sampai dengan triwulan II untuk rata-rata capaian kinerja (seluruh sub kegiatan) sebesar 41,18% dengan katagori Rendah dan untuk capaian keuangan sebesar 68.34% dengan kategori Tinggi, dengan uraian table dibawah ini:

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

1.05.8.01.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TRIWULAN II TAHUN 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024	
								I		II									
3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.6 Nilai	29.312.693.666	73 Nilai	4.769.521.388	74.4 Nilai	8.369.622.756	0 Nilai	1.063.594.235	0 Nilai	3.740.467.294	75.9 Nilai	3.740.467.294	102.02.00	44.69	148.9 Nilai	8.509.988.682	194.39	29.03
	Nilai IKM Perangkat Daerah	88		84		84		0		0		85		101.19.00	0	169		192.05	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.074.391.137	100 %	162.288.600	100 %	464.617.400	24%	68.294.000	48%	125.808.200	100%	405.616.518	100	87.03.00	100%	567.905.118	100	52.86
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111 Dokumen	788.016.037	2 Dokumen	104.736.000	2 Dokumen	363.543.300	0 Dokumen	62.375.800	1 Dokumen	83.580.800	2 Dokumen	306.013.458	100	84.18.00	4 Dokumen	410.749.458	3.6	52.12
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	36.914.800	2 Dokumen	8.933.200	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			2 Dokumen	8.933.200	16.67	24.2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	36.914.800	0 Dokumen	0	2 Dokumen	17.531.600	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.687.300	2 Dokumen	17.531.460	100	100	2 Dokumen	17.531.460	16.67	47.49
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKDP	12 Dokumen	20.994.600	2 Dokumen	3.384.600	2 Dokumen	9.644.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	9.644.000	0	100	2 Dokumen	13.028.600	16.67	62.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	191.550.900	2 Dokumen	45.234.800	2 Dokumen	73.898.500	0 Dokumen	5.918.200	0 Dokumen	35.540.100	2 Dokumen	72.427.600	100	98.01.00	4 Dokumen	117.662.400	33.33	61.43
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														75	95.55.00			17.39	49.46
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100%	18.948.034.691	100 %	3.096.946.653	100 %	4.378.473.106	24.3 %	775.519.382	48.3 %	2.137.592.996	100%	3.917.991.567	100	89.48.00	100%	7.014.938.220	100	37.02
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	18.437.109.365	17 Orang	3.001.457.643	19 Orang	4.252.552.506	4 Orang	762.019.382	8 Orang	2.083.444.996	19 Orang	3.800.739.367	100	89.38.00	19 Orang	6.802.197.010	95	36.89

Renja Perubahan Tahun 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Balangan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Lapora n	12.320.200	1 Lap oran	1.739.500	1 Lap oran	3.042.000	0 Lapora n	0	0 Lapora n	0	1 Lapora n	3.042.000	100	100	2 Lapora n	4.781.500	33.33	38.81
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	108 Lapora n	498.605.126	18 Lap oran	93.749.510	18 Lap oran	122.878.600	4 Lapora n	13.500.000	9 Lapora n	54.148.000	18 Lapora n	114.210.200	100	92.95	36 Lapora n	207.959.710	33.33	41.71
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														100	94.11.00			53.89	39.14
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100%	751.973.495	100 %	110.526.600	100 %	211.474.500	24.3 %	2.880.000	48.3 %	71.831.410	100%	186.531.010	100	88.02.00	100%	297.057.610	100	39.5
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	13 Pakaia n	278.693.495	2 Pak aian	34.865.000	2 Pak aian	71.634.500	0 Pakaia n	0	1 Pakaia n	22.525.000	2 Pakaia n	62.125.000	100	86.72	4 Pakaia n	96.990.000	30.77	34.8
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	473.280.000	10 Ora ng	75.661.600	15 Ora ng	139.840.000	3 Orang	2.880.000	8 Orang	49.306.410	15 Orang	124.406.010	100	88.96	25 Orang	200.067.610	41.67	42.27
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														100	87.84			36.22	38.54
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100%	4.294.907.113	100 %	862.555.359	100 %	1.385.215.100	24%	124.294.184	48%	542.329.519	96%	1.324.182.306	96	95.59.00	96%	2.186.737.665	96	50.91
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	215 Paket	56.870.950	1 Pak et	7.270.300	1 Pak et	10.785.000	0 Paket	0	0 Paket	4.952.500	1 Paket	10.716.500	100	99.36.00	2 Paket	17.986.800	0.93	31.63
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	71 Paket	1.369.851.463	10 Pak et	239.032.500	17 Pak et	718.475.300	4 Paket	900.000	6 Paket	277.440.500	17 Paket	661.394.100	100	92.06.00	27 Paket	900.426.600	38.03	65.73
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket	64.797.375	1 Pak et	10.738.800	1 Pak et	10.741.500	0 Paket	0	0 Paket	5.175.000	1 Paket	10.740.000	100	99.99	2 Paket	21.478.800	7.14	33.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28 Dokum en	19.440.600	1 Dok ume n	2.760.000	1 Dok ume n	3.300.000	1 Dokum en	480.000	1 Dokum en	960.000	1 Dokum en	2.880.000	100	87.27.00	2 Dokum en	5.640.000	7.14	29.01
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2791 Lapora n	2.783.946.725	620 Lap oran	602.753.759	636 Lap oran	641.913.300	159 Lapora n	122.914.184	318 Lapora n	253.801.519	636 Lapora n	638.451.706	100	99.46.00	1 Lapora n	1.241.205.465	0.04	44.58
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														100	95.63			10.66	40.82
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	881.283.000	0%	0	100 %	1.173.783.000	17%	0	20%	657.800.000	100%	1.133.200.000	100	96.54.00	100%	1.133.200.000	100	128.59
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	881.283.000	0 Unit	0	6 Unit	1.173.783.000	0 Unit	0	2 Unit	657.800.000	6 Unit	1.133.200.000	100	96.54.00	6 Unit	1.133.200.000	75	128.59
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														100	96.54.00			75	128.59
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Renja Perubahan Tahun 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Balangan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	1.758.642.030	100 %	264.896.671	100 %	388.853.000	33%	62.493.169	90%	135.364.469	100%	338.059.695	100	86.94	100%	602.956.366	100	34.29
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	660 Laporan	562.986.250	12 Laporan	72.480.000	12 Laporan	131.100.000	3 Laporan	27.300.000	6 Laporan	55.800.000	12 Laporan	131.100.000	100	100	24 Laporan	203.580.000	3,64	36.16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	635.062.880	12 Laporan	93.492.123	12 Laporan	137.745.000	3 Laporan	21.024.950	6 Laporan	41.934.133	12 Laporan	90.377.725	100	65.61	24 Laporan	183.869.848	33.33.00	28.95
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	102	59.451.400	12	14.785.000	12	14.620.000	3	835.000	4	2.735.000	12	14.336.500	100	98.06.00	24	29.121.500	23.53	48.98
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	501.141.500	12 Laporan	84.139.548	12 Laporan	105.388.000	3 Laporan	13.333.219	6 Laporan	34.895.336	12 Laporan	102.245.470	100	97.02.00	24 Laporan	186.385.018	33.33	37.19
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														100	90.17.00			23.46	37.82
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Mili Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100%	1.603.462.200	100 %	272.307.505	100 %	367.206.650	32%	30.113.500	50%	69.740.700	100%	299.523.500	100	81.57.00	100%	571.831.005	100	35.66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	123 Unit	1.248.598.407	24 Unit	200.873.505	22 Unit	227.625.250	6 Unit	20.513.500	12 Unit	50.540.700	22 Unit	179.123.500	100	78.69	46 Unit	379.997.005	37.4	30.43
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Sarana/Prasara n	354.863.793	2 Sarana/Prasara n	71.434.000	3 Sarana/Prasara n	139.581.400	1 Sarana/Prasara n	9.600.000	2 Sarana/Prasara n	19.200.000	3 Sarana/Prasara n	120.400.000	100	86.26.00	5 Sarana/Prasara n	191.834.000	15.15	54.06
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														100	82.48.00			26.28	42.25
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)														99.43.00	89.37.00			99.43	54.12
Predikat Kinerja (Kegiatan)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Suku, Ras/Etnik dan Antar Golongan yang Tertangani	6 Laporan	96.171.124.611	1 Laporan	12.427.729.294	1 Laporan	5.672.912.700	0 Laporan	67.635.266	0 Laporan	220.766.366	1 Laporan	220.766.366	100	-2	2 Laporan	12.648.495.660	166.67	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Forum/Gerakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Aktif	16 Forum	96.171.124.611	2 Forum	12.427.729.294	4 Forum	5.672.912.700	4 Forum	67.635.266	4 Forum	220.766.366	4 Forum	5.420.712.050	100	97.27.00	4 Forum	17.848.441.344	25	18.56
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Kebijakan	71.105.420	2 Kebijakan	6.213.864.647	2 Kebijakan	71.474.800	1 Kebijakan	8.367.966	1 Kebijakan	11.117.966	2 Kebijakan	65.652.966	100	91.85	4 Kebijakan	6.279.517.613	33.33	8

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3000 Orang	4.830.754.013	0 Orang	0	38 Orang	1.566.235.900	10 Orang	46.967.300	20 Orang	171.108.400	38 Orang	1.512.893.384	100	96.59.00	38 Orang	1.512.893.384	1.27	31.32
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1009 Orang	19.175.166.518	58 Orang	6.126.428.647	250 Orang	3.927.076.000	65 Orang	12.300.000	130 Orang	38.080.000	250 Orang	3.834.986.900	100	97.66	250 Orang	9.961.415.547	24.78	51.95
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15 Laporan	76.098.660	3 Laporan	87.436.000	4 Laporan	8.126.000	1 Laporan	0	1 Laporan	460.000	4 Laporan	7.178.800	100	88.34.00	7 Laporan	94.614.800	46,67	124.33
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	18 Laporan	18.000.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0						
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibra	93 Orang	18.000.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0						
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	3 Orang	18.000.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0						
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	3 Laporan	18.000.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0						
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	31 Orang	18.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0						
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														100	93.61			26.51	53.9
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)														100	97.27.00			25	18.56
Predikat Kinerja (Kegiatan)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol yang Aktif	100%	163.401.237.276	100 %	19.244.250.762	100 %	33.304.075.811	24%	102.461.400	48%	30.341.702.440	100%	30.341.702.440	100	91.11.00	100%	49.585.953.202	100	30.35
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Parpol yang Aktif Melaporkan Kegiatan	63 Parpol	163.401.237.276	9 Parpol	19.244.250.762	9 Parpol	33.304.075.811	4 Parpol	102.461.400	9 Parpol	30.341.702.440	9 Parpol	31.704.655.089	100	95.02.00	18 Parpol	50.948.905.851	28.57	31.18

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	84444 Orang	1.033.985.928	2650 Orang	474.765.550	1030 Orang	265.132.000	0 Orang	12.270.000	0 Orang	28.770.000	1200 Orang	115.261.534	116.05.00	43.47.00	3 Orang	590.027.084	57.06	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1256 Orang	157.842.758.848	214 Orang	17.989.336.160	214 Orang	32.086.114.840	0 Orang	83.891.400	100 Orang	30.293.725.440	200 Orang	30.752.740.322	93.46.00	95.84	414 Orang	48.742.076.482	32.96	30.88
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	63 Laporan	4.524.492.500	9 Laporan	780.149.052	9 Laporan	952.828.971	3 Laporan	6.300.000	6 Laporan	19.207.000	9 Laporan	836.653.233	100	87.81	18 Laporan	1.616.802.285	28.57	35.73
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														103.32.00	75.71			30.77	41.22
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)														100	95.02.00			28.57	31.18
Predikat Kinerja (Kegiatan)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang Aktif	100%	1.179.188.286	100%	309.054.310	100%	727.250.600	24%	36.802.800	48%	130.605.075	100%	130.605.075	100	0,775	100%	439.659.385	100	37.28
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang Melaporkan Kegiatan Penanganan Potensi Konflik	61 Ormas	1.179.188.286	9 Ormas	309.054.310	11 Ormas	727.250.600	1 Ormas	36.802.800	1 Ormas	130.605.075	11 Ormas	546.943.775	100	75.21.00	20 Ormas	855.998.085	32.79	72.59
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1309 Orang	495.162.636	468 Orang	121.508.810	540 Orang	318.175.600	21 Orang	27.532.800	137 Orang	32.930.100	400 Orang	261.134.700	74.07.00	82.07.00	868 Orang	382.643.510	66.31	77.28

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	17 Lapora n	684.025.650	3 Lap oran	187.545.500	3 Lap oran	409.075.000	0 Lapora n	9.270.000	1 Lapora n	97.674.975	3 Lapora n	285.809.075	100	69.87	3 Lapora n	473.354.575	17.65	69.2
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														87.04.00	75.97			41.98	73.24
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)														100	75.21.00			32.79	72.59
Predikat Kinerja (Kegiatan)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang Tertangani	6 Lapora n	1.760.715.990	1 Lap ora n	291.023.606	1 Lap ora n	493.599.600	0 Lapora n	19.761.288	0 Lapora n	40.314.088	1 Lapora n	40.314.088	100	08.17	2 Lapora n	331.337.694	33.33	18.82
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Forum yang Aktif Melaksanakan Kegiatan Penanganan Konflik	2 Forum	1.760.715.990	2 Foru m	291.023.606	2 Foru m	493.599.600	0 Forum	19.761.288	2 Forum	40.314.088	2 Forum	393.590.188	100	79.74	2 Forum	684.613.794	100	38.88
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Dokum en	22.472.000	0 Dok ume n	0	2 Dok ume n	22.472.000	0 Dokum en	0	1 Dokum en	0	2 Dokum en	17.931.100	100	79.79	2 Dokum en	17.931.100	16.67	79.79
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	724 Orang	664.657.800	0 Ora ng	0	555 Ora ng	269.718.600	0 Orang	0	0 Orang	4.500.000	555 Orang	200.297.500	100	74.26.00	555 Orang	200.297.500	76.66	30.14
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1805 Orang	899.601.730	35 Ora ng	215.370.506	475 Ora ng	182.863.000	0 Orang	19.761.288	200 Orang	35.814.088	475 Orang	160.151.588	100	87.58.00	510 Orang	375.522.094	28.25	41.74
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	13 Lapora n	173.984.460	1 Lap oran	75.653.100	4 Lap oran	18.546.000	0 Lapora n	0	1 Lapora n	0	4 Lapora n	15.210.000	100	82.01.00	4 Lapora n	90.863.100	30.77	52.22
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														100	80.91			38.09	50.97
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)														100	79.74			100	38.88
Predikat Kinerja (Kegiatan)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik yang Terselesaikan	100%	9.786.825.345	100 %	1.285.328.248	100 %	6.829.269.500	24%	79.410.700	48%	684.085.493	100%	684.085.493	100	10.02	100%	1.969.413.741	100	20.12
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Forum Kewaspadaan dan Penanganan Konflik yang Aktif	34 Forum	9.786.825.345	7 Forum	1.285.328.248	7 Forum	6.829.269.500	7 Forum	79.410.700	7 Forum	684.085.493	7 Forum	5.403.14.926	100	79.12.00	14 Forum	6.688.443.174	41.18	68.34
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	34 Kebijakan	313.484.225	5 Kebijakan	43.327.700	6 Kebijakan	119.294.500	3 Kebijakan	33.120.700	6 Kebijakan	71.133.900	6 Kebijakan	115.239.900	100	96.06.00	11 Kebijakan	158.567.600	32.35	50.58
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	425 Orang	3.733.734.760	32 Orang	972.205.748	122 Orang	1.614.536.000	12 Orang	25.320.000	34 Orang	458.040.175	122 Orang	1.503.553.175	100	93.13.00	154 Orang	2.475.758.923	36.24	66.31
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1600 Orang	905.397.660	200 Orang	107.160.000	250 Orang	200.336.000	0 Orang	11.970.000	0 Orang	41.430.350	250 Orang	118.704.950	100	59.25.00	450 Orang	225.864.950	28.13	24.95
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	26 Laporan	929.510.200	4 Laporan	69.099.600	6 Laporan	1.584.830.000	1 Laporan	9.000.000	3 Laporan	19.215.000	6 Laporan	1.580.13.000	100	99.07.00	10 Laporan	1.649.212.600	38.46	177.43
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	3.904.698.500	1 Dokumen	93.535.200	1 Dokumen	3.310.273.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	94.266.068	1 Dokumen	2.085.503.901	100	63	2 Dokumen	2.179.039.101	13.33	55.81
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														100	82.34.00			29.7	75.02

Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	79.12.00			41.8	68.34
Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Program) (%)		100.46.00	28.33.00			126.63	0
Predikat Kinerja (Seluruh Program)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Kegiatan) (%)		99.67	87.68			76.96	50.7
Predikat Kinerja (Seluruh Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)		97.03.00	87.93			29.44	51.87
Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah
Jumlah Anggaran dari seluruh Program		55.296.73 0.967		1.369.6 65.689		35.157.94 0.756	35.157. 940.75 6
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Kepemimpinan yang kuat dan kerjasama yang baik antar karyawan sesuatu tupoksi masing-masing 2. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan						
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Belum terpenuhi SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas 2. Sinergitas dalam penyelenggaraan kegiatan belum optimal						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	1. Membangun Koordinasi yang sinergitas antar karyawan 2. Memaksimalkan SDM yang ada untuk percepatan realisasi kegiatan sesuai perencanaan 3.Melaksanakan Monev di akhir triwulan untuk menelaah capaian kinerja						

Dari tabel diatas dapat dijelaskan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sampai triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Secara keseluruhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperoleh nilai capaian rata-rata untuk realisasi kinerja kegiatan sebesar 99,43% dengan kategori capaian Sangat Tinggi, dan untuk capaian rata-rata realisasi kinerja keuangan sebesar 42,25% dengan kategori capaian Rendah. Capaian kinerja program merupakan akumulasi rata rata capaian indikator kinerja kegiatan.

Adapun capaian kinerja per Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota rata-rata Sangat Rendah dengan rata rata 26,28%

Capaian Indikator program di atas dicapai dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan-kegiatan yang menunjang Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan memperoleh capaian rata-rata untuk realisasi anggaran sebesar 18,56% dengan predikat Sangat Rendah, sedangkan rata-rata capaian kinerja yang didapat sebesar 25% dengan predikat Sangat Rendah. Hingga Triwulan II tahun 2024 beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan, diantaranya persiapan pembuatan SK kegiatan dan rencana aksi, sedangkan kegiatan lain

sedang dalam tahap proses pelaksanaan sehingga belum dapat dilaporkan dalam realisasi.

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program ini sebagai berikut:

- Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
Sub Kegiatan:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - d. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan Indikator Kinerja Program Persentase Parpol yang Aktif, dapat dikatakan bahwa parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten balangan berjumlah 9 Parpol itu semuanya aktif dan akan mendapatkan bantuan dana hibah.

Rata-rata capaian kinerja kegiatan-kegiatan yang menunjang program ini adalah 28,57% dengan predikat Sangat Rendah, sedangkan rata-rata capaian anggaran adalah sebesar 31,18% dengan predikat Sangat Rendah.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang indikator tersebut

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah,

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik

Sub. Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Pendidikan Politik.

Pada Sub Kegiatan ini kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik terus dilaksanakan secara terjadwal sesuai yang direncanakan.

- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Diskusi Politik dalam merumuskan kebijakan. Pada Sub Kegiatan ini terlaksana 1 kegiatan

- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan indikator Jumlah laporan hasil verifikasi bantuan parpol dimana telah terlaksananya verifikasi bantuan ke 9 Partai politik.

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Rata-rata capaian kinerja kegiatan yang menunjang program ini adalah 32,79% dengan predikat Sangat Rendah dan rata-rata capaian anggaran sebesar 72,59% dengan capaian Sangat Tinggi. Untuk mencapai Indikator kinerja Program yaitu Persentase Ormas yang aktif, telah dilakukan berbagai upaya diantaranya pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap ormas yang terdaftar. Upaya dilakukan melalui metode jemput bola ke lokasi ormas berada.

Berikut kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang program:

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah, dengan indikator kinerja Persentase ormas yang direkomendasikan untuk mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar).
- b. Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Ormas yang dibina melalui monev yang telah dimonev sebanyak 4 ormas.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi dan rata-rata capaian anggaran sebesar 38,88% dengan predikat Rendah, dengan kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang yaitu

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- c. Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitas pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah fasilitas pelaksanaan P4GN (koordinasi dan atau pembinaan).
- d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Fasilitas Pelaksanaan FKUB.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Rata-rata capaian kinerja kegiatan yang mendukung program adalah 41,8% dengan predikat Rendah dan rata-rata capaian anggaran sebesar 68,34% dengan predikat Tinggi.

Kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang yaitu

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daaerah
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daaerah
- c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan

- Konflik di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah rapat koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Serta Penanganan Konflik di Daerah.
- d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah koordinasi deteksi dini konflik sosial, yang telah terlaksana 1 kegiatan.
- e. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Hingga triwulan II, telah dilaksanakan 1 kali kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja seluruh Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sampai dengan Triwulan II dapat dinilai masih “Sangat Tinggi”, yaitu 76,96% dengan penyerapan anggaran 50,7%

Faktor- faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja antara lain:

1. Komitmen bersama untuk melaksanakan percepatan realisasi.
2. Koordinasi Lintas Sektor berjalan baik.
3. Komitmen dan dukungan jajaran pimpinan.
4. Optimalisasi monev terhadap ATHG maupun potensi konflik sosial.
- 5 Komunikasi aktif dari Parpol dan Ormas

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana yang telah disusun
2. Belum terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap ormas keagamaan dan kelompok masyarakat
3. Masih minimnya laporan situasi daerah yang disampaikan oleh mitra kerja lintas sektor.
4. Masih perlunya ditingkatkan pemahaman terhadap tupoksi.
5. Kurang kooperatifnya pengurus parpol dan ormas.

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan

2. Melaksanakan monev ormas keagamaan dan kelompok masyarakat.
3. Mengupayakan diterimanya laporan situasi daerah secara rutin untuk dilaporkan.
4. Optimalisasi monev terhadap ATHG dan potensi konflik sosial.
5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap parpol dan ormas

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perubahan tahun 2024 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Renja Perubahan Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran dalam APBDP Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Prioritas Anggaran Sementara APBDP Tahun Anggaran 2024 harus benar-benar yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas, sehingga pelaksanaan kegiatan Renja Perubahan Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang, satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan dan rapat koordinasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program kegiatan maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	KETERANGAN / CATATAN PENTING	UNIT SKPD
		INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF			
	2	4	7	9	11	4	8	10	12	13	16	17
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESBANGPOL											BADAN KESBANGPOL
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	Kab. Balangan	74,484	7.438.401.958	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	Kab. Balangan	74,484	8.369.622.756	931.220.798		SEKRETARIS
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	100%	356.716.900	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	100%	464.617.400	107.900.500		SUBBAG PROGRAM, ANGGARAN & KEU
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	2 Dok	269.343.300	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	2 Dok	363.543.300	94.200.000	Penambahan anggaran aplikasi SiVita	SUBBAG PROGRAM, ANGGARAN & KEU
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kesbang pol	0 Dok	0	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Balangan	0 Dok	0			

Renja Perubahan Tahun 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Balangan

04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Balangan	2 Dok	9.644.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Balangan	2 Dok	9.644.000	0		
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	2 Dok	60.198.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	2 Dok	73.898.500	13.700.500	Penyesuaian anggaran honor THL	SUBBAG PROGRAM, ANGGARAN & KEU
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	4.128.942.658	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	4.378.473.106	294.530.448		SUBBAG PROGRAM, ANGGARAN & KEU
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	19 Orang	4.003.042.058	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	19 Orang	4.252.552.506	249.510.448	Penyesuaian Gaji dan Tunjangan	SUBBAG PROGRAM, ANGGARAN & KEU
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan	1 Laporan	3.022.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan	1 Laporan	3.042.000	20.000	Penambahan Anggaran Penggandaan	SUBBAG PROGRAM, ANGGARAN & KEU
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Balangan	18 Laporan	122.878.600	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Balangan	18 Laporan	122.878.600			SUBBAG PROGRAM, ANGGARAN & KEU
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	201.034.500	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	211.474.500	10.440.000		SUBBAG UMPEG

02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Balangan	2 Paket	71.634.500	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Balangan	2 Paket	71.634.500	0		SUBBAG UMPEG
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	15 Orang	129.400.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	15 Orang	139.840.000	10.440.000	Penambahan Kontribusi Bintek, Perjalanan Dinas	SUBBAG UMPEG
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	1.179.597.800	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	1.385.215.100	205.617.300		SUBBAG UMPEG
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kesbang pol	1 Paket	10.785.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	1 Paket	10.785.000	0		SUBBAG UMPEG
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	17 Paket	571.858.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	17 Paket	718.475.300	146.617.300	Penambahan Anggaran Perlengkapan Kantor dan Aula	SUBBAG UMPEG
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Balangan	1 Paket	10.697.500	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Balangan	1 Paket	10.741.500	44.000	Penggandaan	SUBBAG UMPEG
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Balangan	1 Dokumen	3.300.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Balangan	1 Dokumen	3.300.000	0		SUBBAG UMPEG

09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	636 Laporan	582.957.300	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	636 Laporan	641.913.300	58.956.000	Penambahan Anggaran untuk Perjalanan Dinas	SUBBAG UMPEG
	Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Balangan	100%	831.783.000	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Balangan	100%	1.173.783.000	342.000.000		SUBBAG UMPEG
01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Balangan	6 Unit	831.783.000	Jumlah kendaraan yang diadakan (buah)	Kab. Balangan		1.173.783.000	342.000.000	Penambahan Anggaran Pengadaan Mobil Operasional	SUBBAG UMPEG
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	Kab. Balangan	100%	380.256.300	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	Kab. Balangan	100%	388.853.000	8.596.700		SUBBAG UMPEG
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	12 Laporan	124.600.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	12 Laporan	131.100.000	6.500.000	Penambahan Anggaran Penggandaan	SUBBAG UMPEG
02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Balangan	12 Laporan	137.745.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Balangan	12 Laporan	137.745.000	0		SUBBAG UMPEG
03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	12 Bulan	12.790.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	12 Laporan	14.620.000	1.830.000	Pemeliharaan Sarana Kantor	SUBBAG UMPEG
04	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	12 Bulan	105.121.300	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	12 Laporan	105.388.000	266.700	ATK, Bahan Kebersihan	SUBBAG UMPEG
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	360.070.800	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	367.206.650	7.135.850		SUBBAG UMPEG

2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Balangan	22 Unit	285.133.400	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Balangan	22 Unit	227.625.250	57.508.150	Belanja Suku Cadang	SUBBAG UMPEG
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Balangan	3 Unit	74.937.400	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Balangan	3 Unit	139.581.400	64.644.000	Renovasi Ruangan Kaban dan Sekretaris	SUBBAG UMPEG
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Suku,Ras/Etnis dan antar Golongan yang tertangani	Kab. Balangan	1 Laporan	5.416.932.700	Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat	Kab. Balangan	1 Laporan	5.572.912.700	155.980.000		KABID IDEOLOGI &WASBANG
	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Forum / Gerakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Aktif	Kab. Balangan	4 Forum	5.416.932.700	Jumlah Forum / Gerakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Aktif	Kab. Balangan	4 Forum	5.572.912.700	155.980.000		BID IDEOLOGI &WASBANG
04	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebaangsaan	Kab. Balangan	38 Orang	1.566.235.900	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebaangsaan	Kab. Balangan	38 Orang	1.566.235.900			BID IDEOLOGI &WASBANG
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di	Kab. Balangan	250 orang	3.771.096.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi	Kab. Balangan	250 orang	3.927.076.000	155.980.000	Seminarkit, Cetak, Penggandaan, Konsumsi Rapat,	BID IDEOLOGI &WASBAN

	Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					Honor Panitia, Perjalanan Dinas	G
05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Balangan	4 Laporan	8.126.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Balangan	4 Laporan	8.126.000	0		BID IDEOLOGI &WASBAN G
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol yang aktif	Kab. Balangan	100%	33.105.137.440	Persentase Parpol yang aktif	Kab. Balangan	100%	33.304.075.811	198.938.371		KABID POLITIK &ORMAS
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik</i>	Jumlah Parpol yang Aktif melaporkan kegiatan	Kab. Balangan	9 parpol	33.105.137.440	Jumlah Parpol yang Aktif melaporkan kegiatan	Kab. Balangan	9 Parpol	33.304.075.811	198.938.371		BID POLITIK &ORMAS

03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	1030 Orang	265.132.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	1030 Orang	265.132.000	0		BID POLITIK &ORMAS
04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	214 Orang	31.947.964.840	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	214 Orang	32.086.114.840	138.150.000	Hibah Kejaksanaan	BID POLITIK &ORMAS
05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	9 Laporan	892.040.600	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Balangan	9 Laporan	952.828.971	60.788.371	Penyesuaian Harga Satuan Hibah Parpol	BID POLITIK &ORMAS

	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase Ormas yang aktif	Kab. Balangan	100%	718.250.600	Persentase Ormas yang aktif	Kab. Balangan	100%	727.250.600	9.000.000		KABID POLITIK &ORMAS
	<i>Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Jumlah Ormas yang melaporkan Kegiatan Penanganan Potensi Konflik	Kab. Balangan	9 Ormas	718.250.600	Jumlah Ormas yang melaporkan Kegiatan Penanganan Potensi Konflik	Kab. Balangan	9 Ormas	727.250.600	9.000.000		BID POLITIK &ORMAS
04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Balangan	540 Orang	309.175.600	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Balangan	540 orang	318.175.600	9.000.000	Penggandaan, Perjalanan Dinas	BID POLITIK &ORMAS
05	Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Balangan	3 Laporan	409.075.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Balangan	3 Laporan	409.075.000			BID POLITIK &ORMAS
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Angka Potensi Konflik sosial berlatar belakang Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang Tertangani	Kab. Balangan	1 Laporan	493.599.600	Angka Potensi Konflik sosial berlatar belakang Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang Tertangani	Kab. Balangan	1 Laporan	493.599.600	0		KABID IDEOLOGI &WASBA NG
	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Forum yang aktif melaksanakan Kegiatan Penanganan Konflik	Kab. Balangan	2 Forum	493.599.600	Jumlah Forum yang aktif melaksanakan Kegiatan Penanganan Konflik	Kab. Balangan	2 Forum	493.599.600			BID IDEOLOGI &WASBAN G

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	2 Dokumen	22.472.000	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	2 Dokumen	22.472.000			BID IDEOLOGI &WASBAN G
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	555 Orang	289.718.600	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	555 Orang	269.718.600	-20.000.000	Pengurangan Honor Panitia	BID IDEOLOGI &WASBAN G
04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitas pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	475 orang	162.863.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Balangan	475 orang	182.863.000	20.000.000	Seminarkit, Konsumsi Kegiatan	BID IDEOLOGI &WASBAN G
05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Kab. Balangan	4 Laporan	18.546.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	Kab. Balangan	4 Laporan	18.546.000			BID IDEOLOGI &WASBAN G

Renja Perubahan Tahun 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Balangan

		Daerah				di Daerah						
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik yang terselesaikan	Kab. Balangan	100%	5.230.539.500	Persentase potensi konflik yang terselesaikan	Kab. Balangan	100%	6.829.269.500	1.598.730.000		KABID WASNAS
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Forum Kewaspadaan dan Penanganan Konflik yang Aktif	Kab. Balangan	7 Forum	5.230.539.500	Jumlah Forum Kewaspadaan dan Penanganan Konflik yang Aktif	Kab. Balangan	7 Forum	6.829.269.500	1.598.730.000		BID WASNAS
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab. Balangan	6 Kebijakan	119.294.500	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab. Balangan	6 Kebijakan	119.294.500			BID WASNAS
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Kab. Balangan	122 Orang	1.614.536.000	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Kab. Balangan	122 Orang	1.614.536.000			BID WASNAS

	Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	250 Orang	112.886.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	250 Orang	200.336.000	87.450.000	Cetak, Souvenir, Konsumsi, Honor, Jasa Tenaga Ahli	BID WASNAS
05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	6 Laporan	73.550.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Balangan	6 Laporan	1.584.830.000	1.511.280.000	Penggandaan, BIN, Pengadaan Prasarana Lapangan	BID WASNAS
06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	1 Dokumen	3.310.273.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	1 Dokumen	3.310.273.000	0		BID WASNAS
TOTAL					52.402.861.798				55.296.730.967	3.387.468.769		

Rencana Perubahan Rencana Kerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenang yang melekat padanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tengah segala keterbatasan sumber daya (*resources*) yang dimilikinya dari sisi infrastruktur maupun aparatur.

Adanya Perubahan Rencana Kerja adalah dikarenakan terdapat penyesuaian-penyesuaian dan kurangnya anggaran pada kegiatan yang akan dilaksanakan.

Adapun program kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Terdapat perubahan anggaran pada kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dari anggaran sebelum perubahan Rp. 356.716.900,- menjadi Rp. 464.617.400,- setelah perubahan yang berarti mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 107.900.500,-. Penambahan anggaran tersebut merupakan penambahan anggaran untuk aplikasi inovasi SKPD yaitu SiVita.

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pagu anggaran murni pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Rp. 60.198.000 kemudian mendapatkan penambahan anggaran sebanyak Rp. 13.700.500 sehingga anggaran perubahan menjadi Rp. 73.898.500. Penambahan anggaran ini digunakan untuk penyesuaian harga satuan jasa tenaga administrasi (Honor THL).

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu anggaran murni pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Rp. 4.003.042.058 kemudian mendapatkan penambahan anggaran sebanyak Rp. 249.510.448 sehingga anggaran perubahan

menjadi Rp. 4.252.552.506. Penambahan anggaran tersebut merupakan penyesuaian gaji dan tunjangan ASN.

2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pagu anggaran murni pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah Rp. 3.022.000 kemudian mendapatkan penambahan anggaran sebanyak Rp. 20.000 sehingga anggaran perubahan menjadi Rp. 3.042.000. Penambahan anggaran tersebut merupakan penambahan anggaran penggandaan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 129.400.000,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 139.840.000,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 10.440.000,-.

Penambahan anggaran dialokasikan untuk penyesuaian volume kontribusi bimtek dan perjalanan dinas.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 571.858.000,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 718.475.300,- yang berarti mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 146.617.300,-

Penambahan anggaran diperuntukan belanja perlengkapan kantor dan aula kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

4.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 10.697.500,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 10.741.500,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 44.000,-.

Penambahan anggaran tersebut merupakan penyesuaian anggaran penggandaan.

4.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 582.957.300,- dan setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 641.913.300,-. Terjadi Pengurangan anggaran sebesar Rp. 58.956.000,-.

Penambahan anggaran dipergunakan untuk perjalanan dinas.

5. Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 831.783.000,- dan setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 1.173.783.000,-. Terjadi Pengurangan anggaran sebesar Rp. 342.000.000,-.

Penambahan anggaran disebabkan karena adanya penambahan belanja mobil operasional sebanyak 1 unit.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 124.600.000,- dan setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 131.100.000,-. Terjadi Pengurangan anggaran sebesar Rp. 6.500.000,-. Penambahan anggaran untuk menyesuaikan pagu belanja penggandaan dan surat menyurat.

6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 12.790.000,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 14.620.000,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 1.830.000,-.

Penambahan anggaran untuk menyesuaikan pagu indikatif sehingga terdapat penambahan pada Belanja pemeliharaan/servis peralatan komputer dan AC

5.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 105.121.300,- dan setelah perubahan

bertambah menjadi Rp. 105.388.000,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 266.700,-.

Penambahan anggaran untuk menyesuaikan pagu indikatif sehingga terdapat penambahan pada Belanja ATK, peralatan kebersihan kantor dan alat / bahan untuk penataan Arsip.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 285.133.400,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 227.625.250,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 57.508.150,-.

Penambahan anggaran untuk menyesuaikan pagu indikatif sehingga terdapat penambahan anggaran pada belanja bahan bakar minyak, belanja suku cadang mobil dinas, belanja pembayaran pajak kendaraan dinas dan pemeliharaan/ service mobil dinas.

6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 74.937.400,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 139.581.400,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 64.644.000,-.

Penambahan anggaran untuk menyesuaikan pagu indikatif sehingga terdapat penambahan anggaran pada belanja renovasi ruang Kepala dan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

B. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

1. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

1.1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal ika dan Sejarah kebangsaan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal ika dan Sejarah Kebangsaan terjadi perubahan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 3.771.096.000,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 3.927.076.000,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 155.980.000,-

Penambahan anggaran terjadi karena adanya penambahan belanja seminarkit, cetak, penggandaan dan konsumsi rapat.

C. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik

- 1.1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Pada Sub Kegiatan ini ada perubahan anggaran sebelum perubahan Rp. 31.947.964.840,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 32.086.114.840,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 138.150.000,-

Anggaran untuk menyesuaikan pagu indikatif untuk penambahan anggaran pada belanja hibah barang kepada pihak lain (Kejaksan).

- 1.2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Adapun anggaran sebelum perubahan Rp. 892.040.600,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 952.828.971,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 60.788.371,-

Anggaran untuk menyesuaikan pagu indikatif untuk penyesuaian besaran hibah Parpol akibat adanya perubahan parpol yang mendapatkan hibah pra dan pasca pemilu.

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT

1. Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1.1. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah

Pada Sub Kegiatan ini anggaran sebelum perubahan Rp. 309.175.600,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 318.175.600,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,-

Penambahan anggaran dipergunakan untuk menambah pagu anggaran penggandaan dan perjalanan dinas yang digunakan untuk melaksanakan program jemput bola ke lokasi ormas

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah

Adapun anggaran sub kegiatan sebelum perubahan Rp. 289.718.600,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 269.718.600,-. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-

Pengurangan anggaran untuk menyesuaikan pagu indikatif pada belanja honor panitia kegiatan.

1.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat

Adapun anggaran sub kegiatan ini sebelum perubahan Rp. 162.863.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 182.863.000,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-

Penambahan anggaran untuk menyesuaikan pagu indikatif pada belanja seminarkit dan konsumsi kegiatan rapat koordinasi.

F. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1.1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.

Adapun anggaran sebelum perubahan Rp. 112.886.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 200.336.000,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 87.450.000,-

Penambahan anggaran untuk menyesuaikan pagu indikatif pada belanja cetak, souvenir, konsumsi dan asa tenaga ahli pada rapat-rapat koordinasi.

1.2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.

Adapun anggaran sebelum perubahan Rp. 73.550.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 1.584.830.000,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 1.511.280.000,-

Penambahan anggaran untuk menyesuaikan pagu indikatif pada belanja penggandaan, pengadaan sarana prasarana lapangan dan hibah barang kepada BINDA KalSel.

BAB IV

PENUTUP

Perencanaan dan Penganggaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah khususnya dalam perencanaan dan penganggaran disusun dan dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan sesuai sasaran yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu, diharapkan dukungan anggaran yang sesuai dengan usulan yang tertuang dalam naskah ini agar program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan secara optimal dan dapat mencapai sasaran. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini sangat tergantung pada tekad, semangat, dan keinginan untuk maju dengan dukungan sikap mental yang kuat dan disiplin dari semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini tentunya sangat dipengaruhi oleh peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta dukungan semua pihak terkait, sehingga sangat diperlukan upaya/langkah-langkah koordinasi dan konsultasi melalui pendekatan secara formal maupun nonformal.

Paringin, Juli 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Balangan



H. SYAIFUDDIN TAILAH, S.Pd., MM
PEMBINA (IV/C)
NIP. 19670403 199403 1 015